

PENGANGGURAN DAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN (STUDI KASUS: KOTA PALEMBANG)

M. Faruk Rosya Ridho

PT. Damarwuri Utama
ITC Baranangsiang Kosambi A8 Bandung
E-mail:faruk_ridho@yahoo.com

Abstrak

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palembang Tahun 2004-2008, persoalan ketenagakerjaan merupakan bagian dari rencana pembangunan. Jika fenomena tingkat pengangguran ini tidak diatasi maka akan timbul permasalahan sosial ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya dalam mengatasi masalah pengangguran untuk mendukung pembangunan di Kota Palembang. Metodologi yang digunakan adalah system dynamics. Hal ini dikarenakan tidak hanya komponen permintaan akhir sebagai determinan tingkat pengangguran melainkan juga tingkat teknologi proses produksi dan tingkat migrasi masuk. Tingkat pengangguran diperkirakan akan semakin meningkat apabila perkembangan ekonomi sosial mengikuti kecenderungan yang sedang terjadi. Untuk menghindari permasalahan tersebut, diperlukan suatu kebijakan yang mampu mengubah kecenderungan perkembangan tersebut agar masalah pengangguran dapat dikurangi seperti yang diharapkan. Berdasarkan temuan studi, kebijakan yang paling efektif dan efisien adalah kebijakan komprehensif, yaitu dengan menerapkan kebijakan pada berbagai variabel determinan secara bersamaan. Kebijakan terbaik adalah dengan menggabungkan secara bersamaan kebijakan perubahan permintaan akhir dengan kebijakan perubahan teknologi proses produksi dan pembatasan migrasi masuk.

Kata Kunci: masalah pengangguran, perubahan permintaan akhir, perubahan teknologi proses produksi, pembatasan migrasi masuk, system dynamics

Abstract

Based on Palembang Middle Range Development Plan (RPJM) Year 2004-2008, employment issues are part of the development plan. If unemployment is not addressed properly there will be serious social economic problems. This article aims at identifying measures to overcome the problem of unemployment to support development in the city of Palembang. The methodology used is the system dynamics. It is because not only the components of final demand as the determinant of the unemployment rate but also the level of production process technology and level of in-migration. The rate of unemployment is expected to further increase if the social economic development following the trend that is happening. To avoid these problems, a policy is needed which is capable of reversing the trend of these developments so that the problem of unemployment can be reduced as expected. The most effective policies are comprehensive and efficient manner, namely by applying policies on various determinant variables simultaneously. Therefore, the best policy is to combine the final demand changes in policy with policy changes in technology and production processes and restrictions of in-migration.

Keywords: unemployment problem, final demand changes, production process technology changes, in-migration restrictions, system dynamics

1. Pendahuluan

Pentingnya persoalan pengangguran merujuk kepada tujuan pembangunan nasional, sebagaimana yang diamanatkan UUD RI tahun 1945 Pasal 27 (ayat 2) bahwa tiap-tiap warga

negara berhak akan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Hal ini juga terkait dengan konsepsi pembangunan berkelanjutan yang salah satu pilarnya adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Palembang Tahun 2004-2008, persoalan ketenagakerjaan merupakan bagian dari rencana pembangunan. Persoalan ketenagakerjaan yang paling utama adalah tingginya tingkat pengangguran. Upaya untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran tertuang dalam RPJM Kota Palembang Tahun 2004-2008. Berdasarkan sasaran tersebut, disusunlah berbagai kebijakan untuk mengatasi tingkat pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya tenaga kerja dan memperbanyak lapangan pekerjaan di Kota Palembang.

Dalam implementasinya, berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi tingkat pengangguran tidak cukup berhasil. Berdasarkan data eksisting, perkembangan tingkat pengangguran cenderung meningkat. Pada tahun 2004, tingkat pengangguran di Kota Palembang sebesar 8,3% per tahun, pada tahun 2005 meningkat menjadi 8,9% per tahun, dan pada tahun 2006 menjadi 9,3% per tahun. Jadi mengacu kepada target RPJM Kota Palembang sebesar 7% pada tahun 2009, maka kondisi yang terjadi saat ini jauh dari yang diharapkan.

Persoalan pengangguran sendiri merupakan masalah yang kompleks dan memiliki mata rantai yang saling terkait satu sama lain. Namun, akar persoalan munculnya pengangguran perkotaan pada prinsipnya disebabkan oleh dua masalah ekonomi sosial yang fundamental, yaitu rendahnya tingkat permintaan kebutuhan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat. Rendahnya permintaan kebutuhan tenaga kerja terjadi karena ketidakseimbangan *supply-demand* pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingginya pertumbuhan penduduk perkotaan disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi penduduk akibat daya tarik ekonomi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka artikel ini bertujuan mengidentifikasi upaya untuk mengantisipasi tingginya tingkat pengangguran agar pembangunan di Kota Palembang dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pembahasan terdiri dari empat bagian. Pembahasan pertama membahas latar belakang artikel ini dilakukan. Kedua membahas mengenai pendekatan *supply* dan *demand* dalam pengangguran perkotaan. Bagian ketiga membahas mengenai analisis untuk merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran perkotaan. Bagian keempat memaparkan kesimpulan.

2. Pendekatan *Supply* dan *Demand* dalam Pengangguran Perkotaan

Pengangguran di perkotaan pada prinsipnya berakar pada dua faktor ekonomi-sosial yang fundamental, yaitu rendahnya tingkat permintaan kebutuhan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat. Rendahnya permintaan kebutuhan tenaga kerja terjadi karena ketidakseimbangan *supply-demand* pertumbuhan ekonomi, sedangkan tingginya pertumbuhan penduduk perkotaan disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi penduduk akibat daya tarik ekonomi. Oleh karenanya, suatu studi mengenai fenomena pengangguran perkotaan memerlukan suatu analisis mengenai faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dan determinasi pertumbuhan penduduk perkotaan.

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam konteks wilayah dan perkotaan, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan ekonomi suatu kota (PDRB) dalam jangka panjang. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan

ekonomi serta bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor tersebut, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui besarnya PDRB yang didapatkan dari tahun ke tahun. Perhitungan pertumbuhan PDRB berpangkal pada dua konsep utama, yaitu pendekatan *supply* dan pendekatan *demand*. Pendekatan *supply* dilakukan dengan menghitung besarnya nilai tambah produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh produsen (perusahaan). Pendekatan *demand* dilakukan dengan menghitung besarnya akumulasi permintaan konsumen (masyarakat, pemerintah, dan perusahaan) terhadap barang dan jasa dalam satu tahun.

Pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan *supply* bertumpu pada sudut pandang ekonomi mikro. Pendekatan *supply* ini banyak didukung oleh ekonom aliran klasik dan neoklasik. Para pakar ekonomi aliran tersebut pada umumnya percaya bahwa faktor-faktor yang menentukan kemakmuran suatu wilayah atau bangsa dapat dilihat dari besarnya produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan. Oleh karenanya, pertumbuhan laju ekonomi yang ideal dapat dicapai dengan meningkatkan faktor-faktor kapasitas produksi barang dan jasa setiap tahunnya.

Salah satu teori pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan *supply* yang cukup komprehensif adalah teori pertumbuhan Solow-Swan (Swan dalam Accinelli, 2007). Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal-output (COR) dapat berubah dan bersifat dinamis. Untuk menciptakan sejumlah *output* tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan

yang dibutuhkan. Jika lebih banyak modal yang digunakan maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, begitupun sebaliknya. Dengan adanya dinamika ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

Dalam konsep *supply* ini, faktor produksi sumber daya lahan budidaya dimasukkan sebagai bagian dari kapital. Daya dukung ketersediaan lahan budidaya dapat menjadi kendala pembentukan nilai tambah produksi. Kapasitas penyediaan lahan budidaya tidaklah bersifat elastisitas sempurna. Jumlah lahan selalu tetap, sehingga kapasitas ketersediaan lahan budidaya baru selalu berkurang, untuk itu dalam jangka waktu panjang efisiensi pemanfaatan lahan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang.

Pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan *demand* bertumpu pada pendekatan ekonomi makro. Pendekatan *demand* sering diartikan dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan *demand* ini dipelopori oleh ekonomi aliran Keynesian. Para ekonomi tersebut lebih meyakini bahwa tolak ukur kemakmuran suatu wilayah atau bangsa lebih direpresentasikan dari besarnya pengeluaran konsumen masyarakat (C), swasta (I), dan pemerintah (G) domestik terhadap permintaan barang dan jasa (Gilarso, 1993). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang ideal dapat dicapai dengan meningkatkan faktor-faktor permintaan seperti konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi swasta-pemerintah, dan perdagangan ekspor-impor antar wilayah atau bangsa.

Perkembangan pendekatan *demand* lebih dikarenakan ketidakmampuan pendekatan *supply* dalam mengatasi kegagalan pasar

ekonomi dunia sekitar tahun 1900-1930-an (Gilarso, 1993). Pada awal tahun 1900-an, perusahaan-perusahaan belomba-lomba memproduksi barang secara tidak terkendali. Karena keterbatasan kemampuan daya beli masyarakat maka stok barang menjadi munumpuk. Sebagian perusahaan mengurangi produksi, sebagian lain melakukan rasionalisasi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menekan biaya produksi. Sebagai akibat rasionalisasi, pendapatan masyarakat semakin turun, barang-barang semakin tidak laku dan kegiatan produksi semakin macet, dan jumlah pengangguran menjadi sangat banyak. Arus gelombang ini terus berputar menjadi depresi dunia yang tidak terkendali pada tahun 1930-an.

Berangkat dari fenomena tersebut, menurut Keynes maka laju pertumbuhan ekonomi yang paling ideal hanya mungkin didapatkan pada titik keseimbangan *supply-demand*. Untuk mencapai dan menjaga keseimbangan tersebut, Keynes mensyaratkan intervensi pemerintah. Semisal apabila terjadi pengangguran, pemerintah dapat memperbesar pengeluaran untuk proyek padat. Karya.

2.2 Analisis Input-Output

Salah satu metode yang cukup komprehensif menampilkan perhitungan PDRB dengan pendekatan *supply-demand* secara bersamaan adalah analisis input-output. Analisis ini dibangun oleh ketersediaan *tabel input – output* (I-O). Tabel I-O merupakan suatu uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan kegiatan perekonomian suatu daerah pada suatu periode tertentu. Analisis input-output adalah suatu analisis atas perekonomian wilayah secara komprehensif karena melihat keterkaitan antarsektor ekonomi di wilayah tersebut secara keseluruhan. Karena keterkaitannya begitu

luas, perubahan pada salah satu sektor, misalnya outputnya meningkat atau menurun, akan memberi dampak pada sektor lainnya.

Pada dasarnya Tabel I-O terdiri dari empat kuadran, dengan tiap kuadran dinyatakan dalam bentuk matriks yang berbeda-beda dimensinya. Namun, kuadran keempat yang memperlihatkan distribusi input primer ke sektor permintaan akhir dianggap bukan merupakan tujuan pokok, sehingga dalam penyusunan Tabel I-O terkadang terabaikan.

Setiap sel pada kuadran I merupakan transaksi permintaan antara, yaitu transaksi barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Kuadran I memiliki peranan penting karena menunjukkan keterkaitan antar sektor ekonomi dalam melakukan proses produksi. Sementara itu, kuadran II merupakan pijakan dasar untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan *demand*. Selanjutnya, kuadran III terdiri dari sel-sel nilai tambah bruto atau input primer. Isian pada kuadran III inilah yang akan dijadikan pijakan dasar untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan *supply*.

2.3 Teori Demografi

Donald J. Bogue (1969) di dalam bukunya yang berjudul '*Principles of Demography*' mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk, serta perubahan-perubahan penduduk sepanjang masa melalui bekerjanya lima komponen demografi yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Secara matematis hubungan antara komponen demografi dapat dilihat pada persamaan:

$$P_t = P_{t-1} + (B - D) + (M_i - M_o)$$

Dimana:

- P_t : Jumlah penduduk pada waktu periode t
 P_{t-1} : Jumlah penduduk pada waktu periode sebelum t
 B : Jumlah Kelahiran yang terjadi pada jangka waktu antara kedua tahu tersebut
 D : Jumlah kematian yang terjadi pada jangka waktu antara kedua tahun tersebut
 M_i : Jumlah Inmigrasi pada jangka waktu antara kedua tahun tersebut
 M_o : Jumlah Outmigrasi pada jangka waktu antara kedua tahun tersebut

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita (Lembaga Demografi FE UI, 1981). Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Salah satu metode pendekatan perhitungan fertilitas adalah *yearly performance*. *Yearly performance* mencerminkan fertilitas dari sekelompok penduduk/berbagai kelompok penduduk untuk jangka waktu satu tahun.

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan (Lembaga Demografi FE UI, 1981). Misalnya, perencanaan fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, dan jasa-jasa lainnya untuk kepentingan masyarakat. Data kematian juga diperlukan untuk kepentingan evaluasi terhadap program-program kebijakan penduduk. Salah satu metode perhitungan kematian adalah dengan Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*). Angka kematian kasar adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun

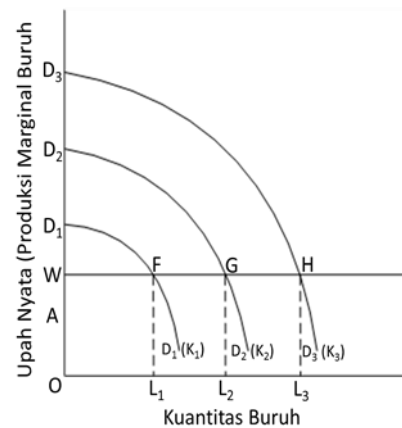
batas administratif dalam suatu wilayah atau negara. Ada dua dimensi migrasi, yaitu dimensi waktu dan dimensi daerah. Untuk dimensi waktu, hampir tidak ada ukuran pasti yang mendefinisikan kapan seseorang pindah disebut migrasi. Di Indonesia, SENSUS penduduk tahun 1961 memberikan batasan waktu bagi penentuan migrasi adalah tiga bulan sedangkan untuk SENSUS penduduk tahun 1971 dan 1980 adalah enam bulan. Untuk dimensi daerah secara garis besar dapat dibedakan menjadi migrasi internasional bila antar negara dan migrasi internal jika migrasi di dalam satu negara. Batasan unit daerah bagi migrasi di Indonesia menurut SENSUS 1961, 1971, dan 1980 adalah propinsi.

Angkatan kerja adalah bentuk penduduk usia kerja (15 tahun ke atas atau lebih) dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti, dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan, mereka sedang mempersiapkan usaha, mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja atau mereka mengharapkan dapat bekerja tetapi merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, juga termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja. Mencari pekerjaan atau biasa disebut pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan seperti mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapat pekerjaan, atau yang sudah pernah bekerja karena sesuatu berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

2.4 Teori Keterkaitan Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Demografi

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa masalah pengangguran berakar pada dua faktor fundamental ekonomi-sosial, yaitu teori pertumbuhan ekonomi dan demografi. Teori yang cukup komprehensif menjelaskan keterkaitan tersebut adalah model pembangunan Lewis-Fei-Ranis yang cukup terkenal bagi negara-negara berkembang. Di dalam model Lewis-Fei-Ranis, perekonomian yang belum berkembang meliputi dua sektor: sektor pertanian subsistem tradisional yang dikarakterisir oleh produktivitas “surplus” tenaga kerja yang nol atau amat rendah; dan sektor industri kota modern yang produktivitasnya tinggi, dimana tenaga kerja dari sektor subsisten secara berangsur-angsur pindah ke sektor ini.

Ilustrasi model Lewis-Fei-Ranis secara sederhana dapat dilihat dalam Gambar 1. Pada garis sumbu vertikal terlihat upah riil dan pada garis sumbu horisontal menunjukkan kuantitas tenaga kerja. Garis OA mewakili tingkat rata-rata pendapatan usaha subsisten yang sebenarnya di dalam sektor pedesaan tradisional. Sedangkan pendapatan upah riil dalam sektor industri kapitalis ditunjukkan pada garis OW. Pada ilustrasi ini, *supply* tenaga kerja dari pedesaan bersifat elastisitas sempurna, seperti yang ditunjukkan oleh kurva horisontal WS. Pada *supply* modal yang *fixed*, K_1 merupakan awal pertumbuhan sektor modern. Kurva permintaan terhadap tenaga kerja ditentukan oleh menurunnya produk marginal tenaga kerja dan diperlihatkan oleh kurva $D_1(K_1)$.



Gambar 1

Ilustrasi Model Lewis-Fei-Ranis
Sumber: Todaro, Michael. 1998

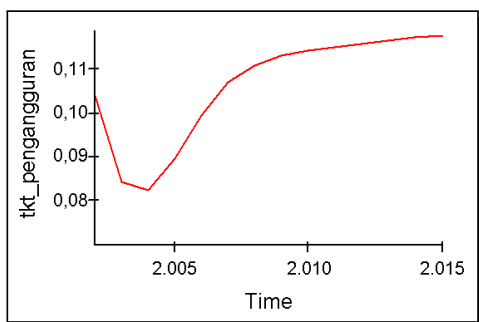
Surplus output yang diperlihatkan oleh wilayah WD_1F merupakan total *profit* yang akan mengalir ke kantong pengusaha kapital. Karena adanya anggapan bahwa seluruh keuntungan diinvestasikan kembali, maka keseluruhan stok modal di sektor modern akan naik dari K_1 ke K_2 . Stok modal yang lebih besar ini menyebabkan kurva total produksi sektor modern akan meningkat yang pada gilirannya akan menyebabkan naiknya produksi marginal atau kurva permintaan tenaga kerja seperti yang terlihat pada garis $D_2(K_2)$. Suatu keseimbangan baru pada tingkat pengerjaan akan terbentuk pada titik G dengan buruh-buruh OL_2 yang sekarang dipekerjakan. Total output meningkat sampai OD_2GL_2 , sementara itu keseluruhan upah dan keuntungan naik sampai $OWGL_2$ dan WD_2G . Sekali lagi, keuntungan yang meningkat ini (WD_2G) akan meningkatkan total stok modal hingga diinvestasikan kembali. Meningkatnya total stok modal ini (K_3) akan menggeser kurva permintaan tenaga kerja sampai $D_3(K_3)$ dan menaikkan tingkat pengerjaan sektor modern hingga L_3 .

3. Analisis Kebijakan untuk Mengatasi Masalah Pengangguran

Tingkat pengangguran diperkirakan akan semakin meningkat apabila perkembangan perekonomian mengikuti kecenderungan yang sedang terjadi. Untuk menghindari permasalahan tersebut, diperlukan suatu kebijakan yang mampu mengubah kecenderungan perkembangan tersebut, agar masalah pengangguran dapat dikurangi seperti yang diharapkan. Berbagai kebijakan yang diperlukan tersebut diidentifikasi dengan analisis sensitivitas sistem. Analisis sensitivitas mengukur sejauh mana pengaruh perubahan-perubahan variabel penting terhadap tingkat pengangguran di Kota Palembang.

3.1 Analisis Kecenderungan

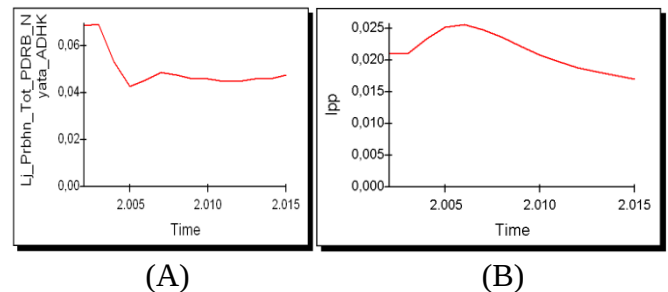
Analisis kecenderungan sistem bertujuan untuk melihat perilaku sistem nyata hingga akhir simulasi, tanpa adanya intervensi kebijakan. Berdasarkan hasil simulasi, dengan besarnya rata-rata laju pertumbuhan permintaan akhir sebesar 18 % di semua sektor, tingkat pengangguran cenderung meningkat.



Gambar 2
Kecenderungan Tingkat Pengangguran
Sumber: Hasil Analisis, 2010

Kecenderungan tingkat pengangguran ini berbeda dengan kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang relatif tetap dan berbeda juga dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang relatif sedikit turun. Tetapnya

pertumbuhan ekonomi karena laju pertumbuhan ekonomi yang tetap sebesar 18 % per tahun, sedangkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dikarenakan tingkat pengangguran yang terus meningkat, sehingga hasrat penduduk untuk bermigrasi masuk berkurang.



(A) (B)
Gambar 3
Kecenderungan Pertumbuhan Ekonomi (A)
dan Pertumbuhan Penduduk (B)
Sumber: Hasil Analisis, 2010

3.2 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas sistem dilakukan dengan mengukur pengaruh keempat blok besar model terhadap tingkat pengangguran yaitu permintaan produksi, penawaran atau kapasitas produksi, penduduk, dan kecukupan lahan budidaya. Pengukuran keempat blok ini ditujukan sebagai studi komparatif untuk melihat apakah permintaan akhir merupakan komponen utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran atau justru komponen lain yang lebih signifikan dalam menekan tingkat pengangguran di Kota Palembang.

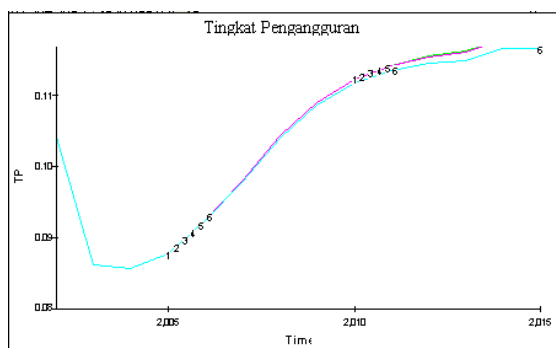
3.2.1 Analisis Sensitivitas Permintaan Akhir Ekonomi

Analisis sensitivitas permintaan akhir ekonomi yang akan dilakukan adalah perubahan pengeluaran pemerintah, perubahan ekspor, perubahan impor, dan perubahan investasi. Sensitivitas perubahan permintaan tersebut mencakup tiap-tiap sektor ekonomi.

Uji sensitivitas perubahan pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X), dan investasi (I), dilakukan dengan meningkatkan laju pertumbuhan G, X, dan I dari 18 % per tahun menjadi rata-rata 21 % per tahun. Sedangkan uji sensitivitas perubahan impor (M) dilakukan dengan mengurangi fraksi impor terhadap output rata-rata sebanyak 25 % dari nilai awalnya.

Perubahan Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan hasil simulasi, pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran tidak terlalu signifikan menurunkan tingkat pengangguran. Pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah (G) yang memberikan kontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran adalah pada sektor perdagangan dan perkantoran. Sedangkan perubahan laju pengeluaran pada sektor pertanian, industri, dan bangunan hampir tidak memberikan dampak terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Palembang. Grafik pengaruh keenam skenario tersebut disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4

Grafik Pengaruh Perubahan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pengangguran

Sumber: Hasil Analisis, 2010

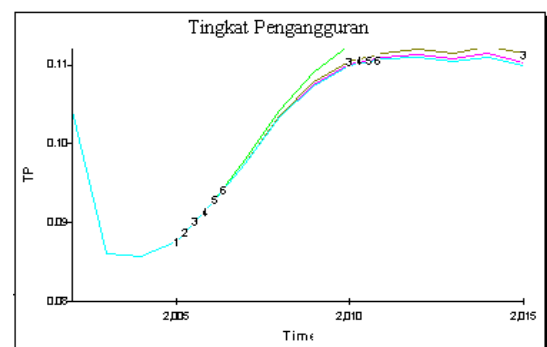
Keterangan:

- (1) Skenario Dasar,
- (2) Skenario Perubahan G Tani
- (3) Skenario Perubahan G Industri,
- (4) Skenario Perubahan G Bangunan

- (5) Skenario Perubahan G Perdagangan,
- (6) Skenario Perubahan G Perkantoran

Perubahan Ekspor dan Impor

Berdasarkan hasil simulasi, pengaruh perubahan ekspor cukup signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Dibandingkan dengan keempat sektor lainnya, peningkatan laju pertumbuhan ekspor sektor industri memberikan kontribusi terbesar dalam menurunkan tingkat pengangguran, diikuti dengan sektor perdagangan dan perkantoran. Grafik pengaruh perubahan ekspor terhadap tingkat pengangguran dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5

Grafik Pengaruh Perubahan Ekspor terhadap Tingkat Pengangguran

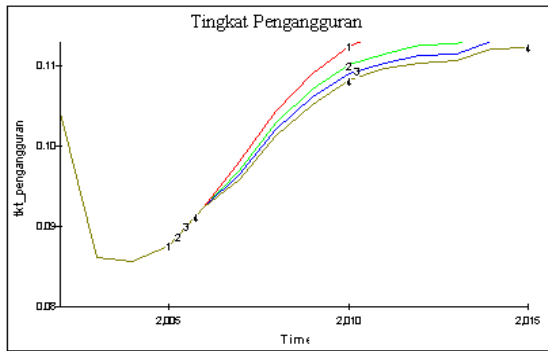
Sumber: Hasil Analisis, 2010

Keterangan:

- (1) Skenario Dasar,
- (2) Skenario Perubahan X Tani
- (3) Skenario Perubahan X Industri,
- (4) Skenario Perubahan X Bangunan
- (5) Skenario Perubahan X Perdagangan,
- (6) Skenario Perubahan X Perkantoran

Berdasarkan simulasi, terlihat bahwa pengaruh perubahan impor cukup signifikan dalam menurunkan tingkat pengangguran di Kota Palembang. Berturut-turut sektor ekonomi yang paling kontributif dalam menurunkan tingkat pengangguran adalah sektor industri, diikuti dengan sektor perdagangan, dan terakhir sektor perkantoran. Grafik pengaruh perubahan impor terhadap tingkat

pengangguran secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6

Grafik Pengaruh Perubahan Impor terhadap Tingkat Pengangguran

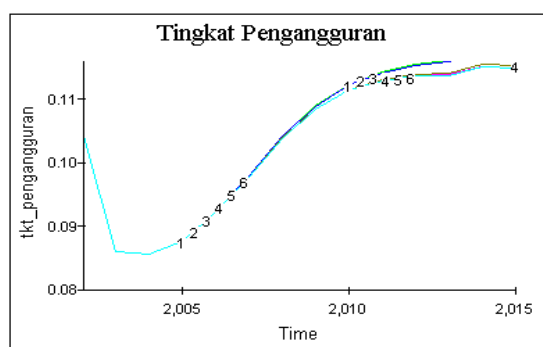
Sumber: Hasil Analisis, 2010

Keterangan:

- (1) Skenario Dasar,
- (2) Skenario Perubahan M Tani
- (3) Skenario Perubahan M Industri,
- (4) Skenario Perubahan M Bangunan
- (5) Skenario Perubahan M Perdagangan,
- (6) Skenario Perubahan M Perkantoran

Perubahan Investasi

Berdasarkan hasil simulasi, perubahan investasi yang memiliki kontribusi terbesar menekan tingkat pengangguran adalah sektor bangunan. Meskipun tidak terlalu signifikan, pengaruh perubahan investasi pada sektor bangunan menunjukkan bahwa investasi pada sektor bangunanlah yang memiliki tingkat sensitivitas menurunkan tingkat pengangguran dibandingkan dengan sektor lainnya. Grafik pengaruh perubahan investasi terhadap tingkat pengangguran disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7

Grafik Pengaruh Perubahan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Keterangan:

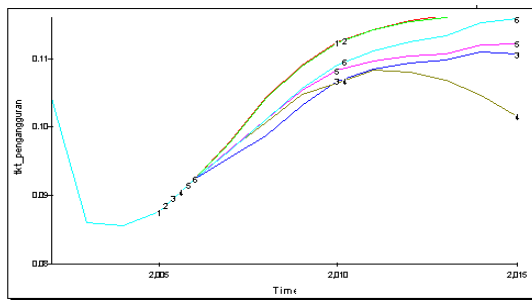
- (1) Skenario Dasar,
- (2) Skenario Perubahan I Tani
- (3) Skenario Perubahan I Industri,
- (4) Skenario Perubahan I Bangunan
- (5) Skenario Perubahan I Perdagangan,
- (6) Skenario Perubahan I Perkantoran

3.2.2 Analisis Sensitivitas Efisiensi Teknologi

Analisis sensitivitas efisiensi teknologi dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana sensitivitas perubahan kapasitas produksi akibat perubahan teknologi terhadap tingkat pengangguran di Kota Palembang. Semakin efisiensi teknologi yang diterapkan pada suatu aktivitas produksi ekonomi, maka penggunaan faktor produksi tenaga kerja akan semakin berkurang.

Simulasi uji sensitivitas teknologi dilakukan dengan menurunkan tingkat laju pertumbuhan efisiensi setiap tahunnya. Besarnya penurunan laju pertumbuhan efisiensi teknologi tiap sektor rata-rata 2 %. Uji sensitivitas efisiensi teknologi ini terdiri atas enam skenario simulasi. Berbeda dengan simulasi pada sensitivitas permintaan akhir, simulasi tiap skenario efisiensi teknologi tidak bersifat akumulatif. Skenario pertama adalah skenario dasar. Skenario kedua adalah skenario dasar ditambah dengan penurunan laju efisiensi pada sektor pertanian. Skenario ketiga adalah skenario dasar ditambah dengan penurunan laju efisiensi pada sektor industri. Skenario keempat adalah skenario dasar ditambah dengan penurunan laju efisiensi pada sektor bangunan. Skenario kelima adalah skenario dasar ditambah dengan penurunan laju efisiensi pada sektor perdagangan. Skenario keenam adalah skenario dasar ditambah

dengan penurunan laju pertumbuhan efisiensi pada sektor perkantoran.



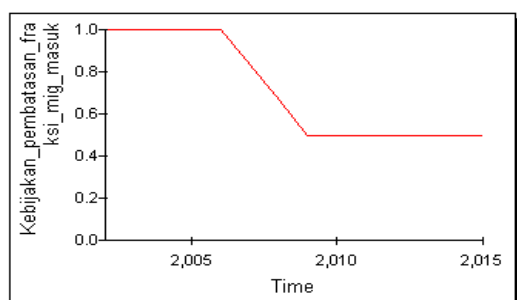
Gambar 8
Grafik Pengaruh Perubahan Efisiensi
Teknologi terhadap Tingkat Pengangguran
Sumber: Hasil Analisis, 2009

Keterangan:

- (1) Skenario Dasar,
- (2) Skenario Perubahan Teknologi Tani
- (3) Skenario Perubahan Teknologi Industri,
- (4) Skenario Perubahan Teknologi Bangunan
- (5) Skenario Perubahan Teknologi Perdagangan,
- (6) Skenario Perubahan Teknologi Perkantoran

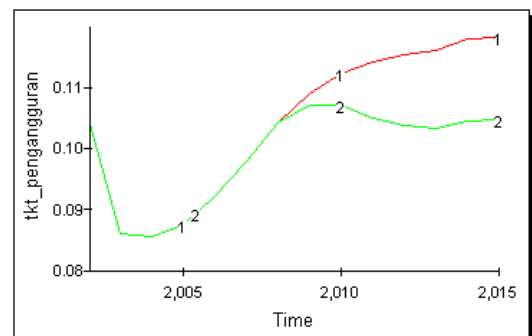
3.2.3 Analisis Sensitivitas Migrasi Masuk

Analisis sensitivitas migrasi masuk dilakukan dengan skenario pembatasan migrasi masuk. Skenario pembatasan yang digunakan adalah 50 % dari jumlah migrasi normal. Diasumsikan pemberlakuan kebijakan ini dimulai pada tahun 2006, sedangkan waktu pentahapan kebijakan adalah tiga tahun dari waktu pemberlakuan, setelah tiga tahun pertama maka pembatasan migrasi masuk akan konstan. Grafik skenario kebijakan pembatasan migrasi masuk dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9
Grafik Skenario Kebijakan Pembatasan
Migrasi Masuk
Sumber: Hasil Analisis, 2010

Uji sensitivitas pembatasan migrasi masuk ini dilakukan dengan dua skenario, yaitu skenario dasar (pertama) dan skenario pembatasan migrasi masuk (kedua). Berdasarkan hasil simulasi tampak bahwa kebijakan pembatasan migrasi masuk cukup signifikan dalam menahan tingkat migrasi masuk, tetapi tidak cukup ampuh untuk menurunkan tingkat pengangguran di kota pelambang. Secara lebih jelas, perbandingan kedua skenario pembatasan migrasi masuk dapat dilihat pada Gambar 10.

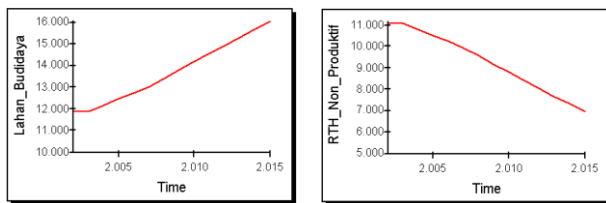


Gambar 10
Grafik Pengaruh Perubahan Migrasi Masuk
terhadap Tingkat Pengangguran
Sumber: Hasil Analisis, 2010

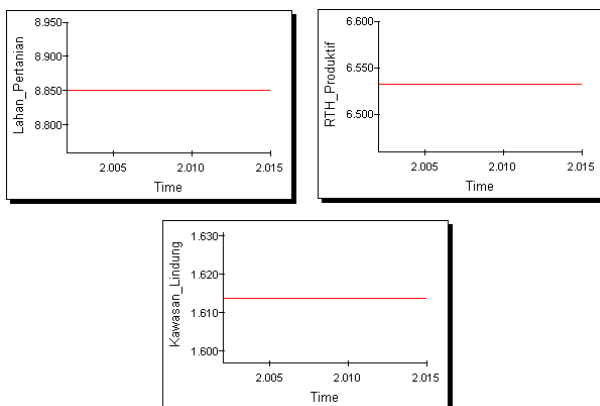
3.2.4 Analisis Sensitivitas Kecukupan Lahan Budidaya

Analisis sensitivitas kecukupan lahan budidaya bertujuan untuk melihat sejauh mana keterbatasan lahan-lahan budidaya mampu mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota Palembang. Ketersediaan lahan budidaya untuk keperluan penambahan output ekonomi sangat mempengaruhi investor untuk berinvestasi di Kota Palembang. Sensitivitas kecukupan lahan ini dilakukan dengan melihat seberapa besar cadangan lahan budidaya yang tercukupkan hingga akhir simulasi. Cadangan lahan budidaya berasal dari lahan RTH dan lahan pertanian, dengan struktur prioritas RTH non produktif, diikuti lahan pertanian perkotaan, dan terakhir RTH Produktif.

Berdasarkan hasil simulasi dengan skenario dasar, tampaknya cadangan lahan RTH untuk lahan budidaya masih mencukupi hingga akhir simulasi. Sehingga ketersediaan lahan budidaya masih tercukupi. Dengan kata lain, hingga akhir simulasi ketersediaan lahan budidaya tidak sensitif mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota Palembang. Oleh karena itu, tidak diperlukan kebijakan peningkatan parameter alih fungsi lahan RTH dan pertanian ke lahan budidaya maupun kebijakan pembatasan maksimum pembangunan satu unit rumah. Grafik pemanfaatan lahan budidaya dan banyaknya alih fungsi luas lahan RTH non produktif ke lahan budidaya dapat dilihat pada Gambar 11. Sedangkan kecukupan lahan RTH produktif, lahan pertanian, dan pemanfaatan kawasan lindung dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 11
Pemanfaatan Lahan Budidaya dan Alih Fungsi Lahan RTH Non Produktif ke Lahan Budidaya
Sumber: Hasil Analisis, 2010



Gambar 12
Alih Fungsi Lahan Pertanian, RTH Produktif, dan Pemanfaatan Kawasan Lindung
Sumber: Hasil Analisis, 2010

3.3 Arahkan Skenario Pengembangan Kebijakan Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kota Palembang

Arahkan skenario bertujuan untuk memberikan alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Palembang. Formulasi arahan kebijakan didapatkan dari berbagai uji simulasi sensitivitas. Berdasarkan hasil uji sensitivitas, diperoleh tiga komponen utama sebagai determinan tingkat pengangguran di Kota Palembang yaitu permintaan akhir ekonomi, tingkat efisiensi teknologi, dan migrasi masuk. Berdasarkan uji sensitivitas tersebut akan dilihat perilaku model pada beberapa skenario sehingga dapat dianalisis beberapa kebijakan dari skenario tersebut.

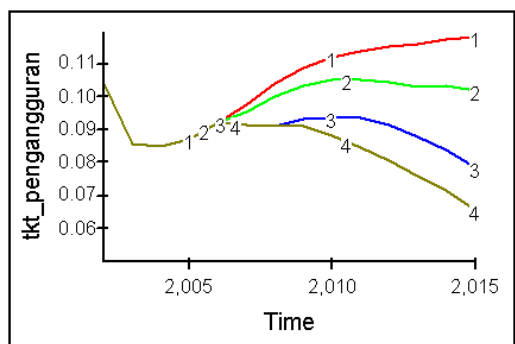
Perilaku Model pada Beberapa Skenario

Berdasarkan uji sensitivitas, perubahan variabel secara parsial tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran. Contohnya pada komponen perubahan permintaan akhir ekonomi, perubahan pada sisi permintaan ekspor semata tidak akan memberikan kontribusi besar terhadap penurunan tingkat pengangguran, sekalipun dilakukan pertumbuhan ekspor pada semua sektor ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif melalui suatu paket kebijakan yang mampu mengoptimalkan berbagai faktor determinan secara bersamaan.

Terdapat empat arahan skenario paket kebijakan dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kota Palembang. Skenario pertama merupakan skenario dasar, tanpa intervensi paket kebijakan. Skenario kedua berupa peningkatan permintaan akhir melalui berbagai paket kebijakan laju pertumbuhan

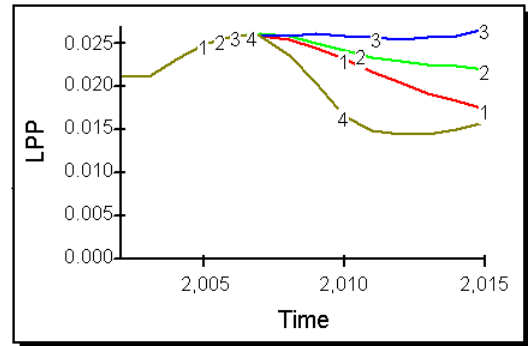
permintaan akhir pada sektor-sektor ekonomi yang paling kontributif. Skenario ketiga adalah skenario kedua yang ditambah dengan paket kebijakan mengubah struktur perekonomian melalui instrumen tingkat efisiensi teknologi pada proses produksi. Skenario keempat adalah skenario ketiga ditambah dengan kebijakan pembatasan pertumbuhan angkatan kerja mencari kerja melalui instrumen pembatasan migrasi masuk.

Pengujian keempat skenario di atas akan diukur melalui empat indikator variabel yaitu tingkat pengangguran, laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, dan kecukupan ketersediaan lahan aktivitas ekonomi. Jika diukur melalui tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan penduduk, maka skenario keempat yang paling signifikan mengurangi tingkat pengangguran, seperti terlihat pada Gambar 13 dan 14. Namun, jika mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi maka skenario ketiga yang paling tepat, seperti terlihat pada Gambar 15. Berdasarkan hasil simulasi, seperti yang tampak pada Gambar 16 hingga tahun 2015 kecukupan lahan budidaya untuk semua skenario masih mencukupi kebutuhan, sehingga keterbatasan sumber daya lahan belum menjadi kendala terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan penduduk.



Gambar 13

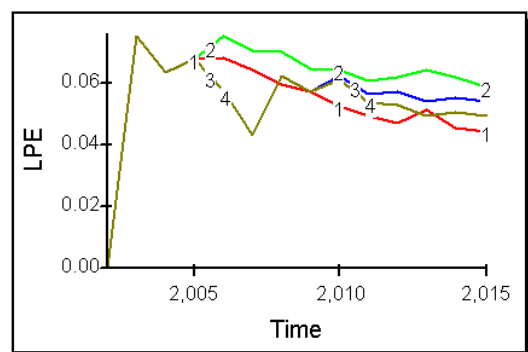
Uji Skenario terhadap Tingkat Pengangguran
Sumber: Hasil Analisis, 2010



Gambar 14

Uji Skenario terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk

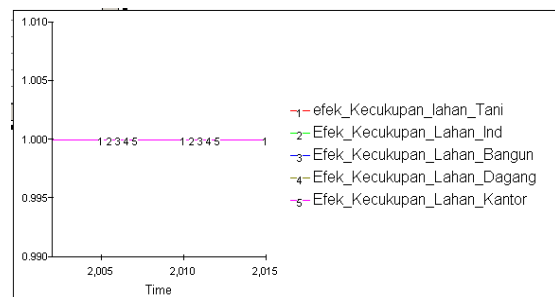
Sumber: Hasil Analisis, 2010



Gambar 15

Uji Skenario terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Hasil Analisis, 2010



Gambar 16

Uji Skenario terhadap Efek Kecukupan Lahan
Sumber: Hasil Analisis, 2010

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan dari sejauh mana implementasi antara hasil pemodelan sistem yang dibangun dengan dunia nyata. Oleh karena itu, berbagai skenario kebijakan yang didapatkan dari pemodelan akan diletakkan ke dalam keadaan sistem yang sebenarnya. Untuk itu, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah menganalisis sejauh

mana kekuatan dan kendala sumber-sumber pembangunan yang dimiliki oleh Kota Palembang untuk mendukung upaya mengatasi masalah pengangguran.

a. Skenario 1

Skenario I adalah skenario dasar. Skenario ini berjalan jika kondisi nyata yang terjadi antara tahun 2002 – 2006 terus berlangsung hingga tahun 2015. Seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya, jika kondisi yang terjadi sekarang terus berlanjut ke masa mendatang, maka kondisi yang akan datang dipandang tidak mengarah kepada kondisi yang diinginkan.

b. Skenario 2

Skenario 2 adalah menambah skenario dasar dengan kebijakan peningkatan permintaan akhir. Tujuan skenario 2 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palembang melalui peningkatan ekspor, investasi, dan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor unggulan seperti pada sektor industri dan perdagangan.

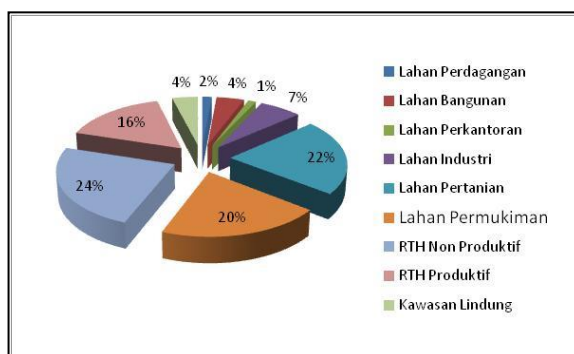
Dengan memperhatikan kondisi yang ada di Kota Palembang, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui permintaan akhir ekonomi ini sangat memungkinkan. Penjelasan kekuatan internal dan eksternal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan akhir adalah sebagai berikut:

- 1) Letak geografis Kota Palembang yang strategis dapat menjadi daya tarik ekonomi bagi masuknya investasi ke Kota Palembang. Posisi Kota Palembang dilalui jalur nasional yakni Lintas Sumatera yang menghubungkan bagian utara ke bagian selatan Pulau Sumatera hingga ke Pulau

Jawa. Dengan demikian Kota Palembang merupakan pintu gerbang utama untuk memasuki wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Kota Palembang juga terletak pada Zona IMS-GT (Segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia dan Singapore), sehingga sangat potensial dalam mengembangkan perekonomian.

- 2) Terdapatnya Pelabuhan Udara, Laut serta sarana dan prasarana Transportasi Darat. Fasilitas pelabuhan udara, laut dan prasarana transportasi darat merupakan modal yang penting dalam menunjang perekonomian daerah, memperlancar aktivitas masyarakat, terutama dalam meningkatkan perdagangan antar daerah. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II saat ini mempunyai landasan pacu sepanjang 3.000 m, sehingga memungkinkan didarati pesawat berbadan lebar. Hal ini memberikan dorongan bagi perkembangan hubungan internasional, seperti perdagangan ekspor-impor. Adanya pelabuhan laut Boom Baru dan beberapa dermaga lainnya telah memberikan manfaat bagi transportasi laut/sungai, distribusi barang, jasa, dan pariwisata. Begitu juga dengan adanya prasarana transportasi darat, seperti angkutan kereta api di Kertapati, dan terminal induk Karya Jaya serta beberapa terminal lainnya, bermanfaat memperlancar arus transportasi dan mendukung kegiatan perekonomian masyarakat.
- 3) Salah satu syarat utama pengembangan perekonomian adalah ketersediaan lahan untuk kegiatan ekonomi. Potensi lahan yang masih cukup luas ini dapat menjadi pendorong bagi investor untuk berinvestasi. Kota Palembang mempunyai luas 40.061 Ha (400,61 km²). Adapun luas area terbangun saat ini (*Coverage Area*) sebesar 12.475 Ha. Berdasarkan RTRWK, luas kota

lahan budidaya potensial untuk pembangunan atau dapat dibangun sebesar 22.178 Ha. Sedangkan berdasarkan hasil simulasi, luas lahan budidaya yang diperlukan untuk pembangunan kegiatan ekonomi hingga tahun 2015 adalah sebesar 14.421 Ha atau sebesar 36 % dari luas lahan total Kota Palembang. Jadi ketersediaan lahan untuk kegiatan ekonomi masih sangat mencukupi hingga tahun 2015. Distribusi pemanfaatan lahan di Kota Palembang untuk tahun 2015 berdasarkan pemodelan dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17

Distribusi Kebutuhan Lahan Kota Palembang
Tahun 2015

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Kekuatan eksternal yang dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan akhir ini adalah dengan memanfaatkan iklim dunia usaha global. Berdasarkan UU 32/ 2004, Pemerintah Kota Palembang dapat melakukan upaya kerja sama ekonomi secara langsung dengan dunia luar. Pemberlakuan berbagai peraturan mengenai otonomi daerah tersebut memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat Kota Palembang untuk dapat melaksanakan pembangunannya atas prakarsa sendiri. Hal tersebut memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk mandiri dan mengembangkan potensinya.

Di sisi lain, dengan melihat kondisi nyata di Kota Palembang, maka skenario 2 ini memiliki kendala internal sebagai kelemahan yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, sering terjadinya banjir di Kota Palembang, dan rendahnya penerimaan APBD Kota Palembang. Penjelasan kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan data BPS Palembang Dalam Angka Tahun 2002 dan 2006, pencari kerja terbanyak didominasi oleh lulusan SMU. Pada tahun 2002, pencari kerja lulusan SMU mencapai 57 % dari jumlah total pencari kerja. Sedangkan pada tahun 2006, pencari kerja lulusan SMU meningkat menjadi 65 % dari jumlah total pencari kerja. Penurunan yang signifikan terjadi pada pencari kerja lulusan sarjana, dimana pada tahun 2002 sebanyak 27 % dari total pencari kerja menjadi 18 % dari jumlah total pencari kerja pada tahun 2006. Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pencari kerja Kota Palembang cenderung turun, meskipun masih tetap didominasi oleh lulusan SMU. Sehingga untuk menyerap tenaga kerja di Kota Palembang, karakteristik lapangan kerja yang diperlukan adalah lapangan kerja yang tidak terlalu menggunakan teknologi tinggi.

2) Di wilayah Kota Palembang saat ini masih terdapat daerah rawan banjir dan terdapat 51 lokasi genangan. Berdasarkan survey Palembang Urban Development Program II (PUDP II), luas genangan di Kota Palembang 126,87 Ha, frekwensi genangan sekitar 75 kali dalam setahun, tinggi genangan rata-rata 0,33 m dan lama genangan rata-rata 4,63 jam. Jika permasalahan banjir ini tidak diatasi, maka

pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang akan terhambat.

- 3) Salah satu komponen permintaan akhir adalah pengeluaran pemerintah. Besarnya pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh besarnya penerimaan pendapatan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Penerimaan Asli Daerah (PAD). Selama lima tahun terakhir (2002-2006), kontribusi PAD Dari tahun ke tahun tidak terlalu signifikan terhadap APBD. Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2002 menyumbang sebesar 52,3 milyar atau sekitar 11 % dari penerimaan total dan pada tahun 2006 sebesar 103,2 milyar atau sekitar 21 % dari penerimaan total. Sedangkan PAD murni yang normal berkisar antara 25 % - 50 % dari APBD. Rendahnya PAD ini menunjukkan bahwa penerimaan Pemerintah Kota Palembang masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil simulasi pemodelan, sekalipun berbagai kekuatan mampu dioptimalkan dan berbagai kendala mampu diatasi oleh Pemerintah Kota Palembang, tetap saja belum cukup mengatasi masalah tingginya tingkat pengangguran di Kota Palembang.

c. Skenario 3

Skenario 3 adalah skenario 2 ditambah dengan kebijakan penurunan tingkat efisiensi teknologi proses produksi. Tujuan skenario ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui keseimbangan *supply-demand*. Berdasarkan hasil simulasi, skenario 2 belum mencukupi untuk mengatasi masalah pengangguran di Kota Palembang. Oleh karena itu, pada skenario 3 ini pertumbuhan ekonomi selain dicapai dengan peningkatan permintaan

akhir juga ditambah lagi dengan kebijakan penurunan tingkat efisiensi teknologi proses produksi.

Penurunan tingkat efisiensi teknologi mengindikasikan terjadi peralihan teknologi proses produksi dari padat modal ke padat karya pada sektor industri dan bangunan. Berdasarkan pemaparan pada skenario 2, salah satu permasalahan banyaknya ketidakterserapan tenaga kerja potensial adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Padahal besarnya jumlah penduduk di Kota Palembang merupakan sumber tenaga kerja potensial, sekaligus sebagai salah satu modal dasar pembangunan dan potensi pasar yang besar. Oleh karena itu salah satu strategi kebijakannya adalah dengan merubah struktur kegiatan ekonomi. Untuk sektor industri, kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah saatnya mulai digiatkan. Sedangkan untuk sektor bangunan, kegiatan pada pembangunan infrastruktur tampaknya dapat menjadi tumpuan dalam upaya menyerap tenaga kerja.

Saat ini sektor industri yang mendominasi di Kota Palembang adalah industri berat seperti PT Pusri dan PT Pertamina, sedangkan perkembangan industri usaha kecil dan menengah masih bersifat alamiah. Padahal salah satu keunggulan Kota Palembang adalah memiliki *branded image* sebagai kota empek – empek dan kerupuk ikan, yang merupakan makanan khas daerah dan memberikan kontribusi cukup besar dalam perekonomian daerah. *Branded image* ini belum ditambah lagi dengan produk industri kain songket, ukir-ukiran, dan kasur Palembang. Berbagai potensi ini memberikan nilai jual dan *value added* bagi wisatawan dan masyarakat luar Kota Palembang. Jika semua potensi ini tergarapkan hingga maksimal pada skala nasional dan internasional, maka keterserapan tenaga kerja akan semakin banyak.

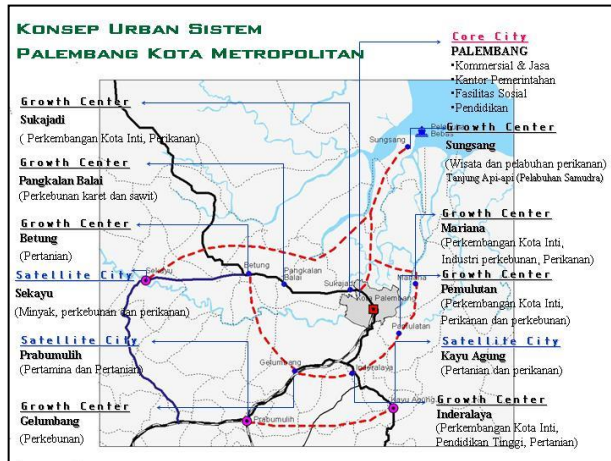
Perkembangan pembangunan sektor bangunan di Kota Palembang saat ini masih menitikberatkan pada infrastruktur darat, seperti perluasan Bandar Udara Sultan Badaruddin II, Pelabuhan Laut Boom Baru, Terminal Karjaya, dan terakhir jembatan layang sepanjang 5 km di pusat perkotaan. Padahal salah satu potensi Kota Palembang adalah Sungai Musi. Sungai Musi membagi Kota Palembang menjadi daerah hulu dan daerah hilir. Keberadaan Sungai Musi berpengaruh besar terhadap perekonomian. Sejak lama Sungai Musi dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya sebagai sarana transportasi, angkutan hasil bumi, perdagangan dan sumber air. Sehingga, jika Pemerintah Kota Palembang lebih menggiatkan pembangunan infrastruktur transportasi laut di sekitar perairan sungai musu, selain mampu membuka lapangan kerja, *multiplier effect* dari pembangunan infrastruktur ini dapat menjadi tumpuan bagi kegiatan ekonomi pariwisata sungai. Lebih jauh, peningkatan pariwisata sungai ini nantinya dapat menyerap angkatan kerja lebih banyak.

Selain potensi, upaya kebijakan skenario 3 ini dihadapi pada kendala eksternal berupa ancaman tingginya arus urbanisasi. Berdasarkan hasil simulasi pemodelan, salah satu kendala dari kebijakan ini adalah meningkatnya imigrasi masuk ke Kota Palembang. Besarnya imigrasi masuk ini disebabkan karena daya tarik ekonomi Kota Palembang. Peningkatan imigrasi masuk ini semakin menambah jumlah angkatan kerja mencari kerja, sehingga meskipun kesempatan kerja meningkat tetap saja tingkat pengangguran belum mencapai kondisi yang diinginkan.

d. Skenario 4

Skenario 4 adalah skenario 3 ditambah dengan kebijakan pembatasan imigrasi masuk ke Kota Palembang. Tujuan skenario ini adalah mengantisipasi ancaman urbanisasi berdasarkan simulasi pada skenario 3. Berdasarkan hasil simulasi pemodelan, skenario 4 cukup baik mengurangi tingkat pengangguran di Kota Palembang. Hasil simulasi menunjukkan pada tahun 2015, tingkat pengangguran berada pada kisaran 7 % per tahun.

Sesuai dengan visi RPJM Kota Palembang 2004-2008 untuk menjadikan Kota Palembang sebagai kota metropolitan yang mandiri dan berkualitas, maka arahan kebijakan mengurangi imigrasi masuk diimplementasikan dalam konteks kewilayahan. Dengan pembangunan wilayah yang berbasis perekonomian, diharapkan terjadi pergeseran fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan dari Kota Palembang ke kota-kota di sekitarnya. Salah satu konsep pembangunan kewilayahan yang dapat dipakai adalah pendekatan kota "*Satelite and Neighbourhood plans*". Dalam hal ini kota utama yang ada dengan kota-kota kecil di sekitarnya (Kota "Satelite") akan dijalin hubungannya sedemikian rupa sehingga pertalian fungsional ekonomi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan potensi yang terdapat di Kota Palembang dan kota-kota sekitarnya, maka arahan struktur konsep pembangunan kewilayahan dapat dilihat pada Gambar 18 berikut.



Gambar 18
Arahan Struktur Konsep Pembangunan
Wilayah Kota Palembang
Sumber: Hasil Analisis, 2010

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi, diketahui bahwa komponen yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota Palembang adalah komponen permintaan akhir, tingkat teknologi proses produksi, dan tingkat migrasi masuk. Untuk komponen permintaan akhir, variabel yang paling sensitif dalam menurunkan tingkat pengangguran adalah perubahan ekspor, diikuti oleh perubahan impor, dan perubahan investasi, sedangkan perubahan pengeluaran pemerintah tidak terlalu kontributif. Sedangkan perubahan permintaan akhir sektor ekonomi yang paling sensitif adalah sektor industri, diikuti dengan sektor perdagangan, dan sektor bangunan. Untuk tingkat efisiensi teknologi, perubahan yang paling sensitif adalah pada sektor bangunan dan industri.

Tingkat pengangguran diperkirakan akan semakin meningkat apabila perkembangan perekonomian mengikuti kecenderungan yang sedang terjadi. Untuk menghindari permasalahan tersebut, diperlukan suatu kebijakan yang mampu mengubah kecenderungan perkembangan tersebut agar masalah pengangguran dapat dikurangi seperti

yang diharapkan. Berdasarkan temuan studi, kebijakan yang paling efektif dan efisien menurunkan tingkat pengangguran di Kota Palembang adalah dengan kebijakan komprehensif yaitu dengan menerapkan kebijakan pada berbagai variabel determinan secara bersamaan. Pendekatan kebijakan parsial dan sektoral tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam menurunkan tingkat pengangguran. Skenario paket kebijakan yang hanya bertumpu pada perubahan permintaan akhir bersifat jangka pendek dan tidak mampu menurunkan tingkat pengangguran. Sehingga kebijakan yang paling optimal adalah dengan menggabungkan secara bersamaan kebijakan perubahan permintaan akhir dengan kebijakan perubahan teknologi proses produksi dan pembatasan migrasi masuk.

Pemaparan rekomendasi merupakan paparan mengenai usulan langkah tindak dalam upaya mengatasi masalah pengangguran untuk mendukung pembangunan di Kota Palembang. Rekomendasi yang dipaparkan mencakup usulan kepada Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Lebih lanjut, rekomendasi studi dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Palembang, diperlukan upaya untuk meningkatkan permintaan akhir produksi ekonomi, khususnya melalui peningkatan laju pertumbuhan ekspor sektor industri, mengurangi impor sektor perdagangan, dan menambah investasi di sektor bangunan. Sedangkan pada sisi *supply*, untuk meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan maka Pemerintah Kota Palembang perlu mengarahkan struktur proses produksi ke arah padat karya ketimbang padat modal, khususnya sektor industri dan sektor bangunan. Untuk sektor

industri, salah satu rekomendasi misalnya dengan memberikan bantuan dan kemudahan fiskal ke sektor industri kecil dan menengah, sehingga keterserapan tenaga kerja dari industri kecil dan menengah semakin besar. Sedangkan untuk sektor bangunan, salah satu rekomendasi adalah dengan mengadakan proyek pembangunan infrastruktur transportasi sungai.

2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan upaya pembangunan wilayah berbasis ekonomi. Melalui pembangunan wilayah diharapkan terjadi peralihan fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dari Kota Palembang ke kota-kota di sekitarnya. Dengan peralihan tersebut, diharapkan arus migrasi masuk ke Kota Palembang dapat berkurang. Salah satu program kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan relokasi industri berdasarkan zonasi potensi ekonomi wilayah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Muhamad Tasrif, Ir., M.Eng., Dr untuk arahan dan bimbingan sehingga artikel ini dapat ditulis. Terima kasih juga kepada dua mitra bestari yang telah memberikan komentar yang berharga.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (ayat 2) tentang Hak Warga Negara akan Penghidupan dan Pekerjaan Yang Layak.
- Peraturan Daerah kota Palembang No 12 Tahun 2004 Tentang Rencana Strategis (RPJM) Kota Palembang Tahun 2004-2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penataan Ruang.
- Todaro, Michael. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Adisasmita, Rahardjo. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu. 2005
- Bogue, Donald J.. 1969. *Principles of Demography*. New York : John Wiley and Son
- Accinelli, Elvio. *Population Growth and the Solow-Swan Model*. 2007.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro, jilid 1 dan 2*. Kanisius. 1993.
- Gilarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro*. Kanisius. 1993.
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. *Dasar Dasar Demografi*. 1981.
- Kementrian Pekerjaan Umum. *Model Dinamika Kota Semarang; Study on New Improved Technique for Spatial Planning in Metropolitan Area*. 2005